



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS
MELAYANI (WBBM)
2022**

**PENATAAN
SISTEM
MANAJEMEN
SDM**

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL



**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

**DATA INFORMASI KEPEGAWAIAN UNIT KERJA TELAH
DIMUTAKHIRKAN SECARA BERKALA**

Daftar Isi

1. Simpeg.jpeg
2. My SAPK.jpeg
3. Aktivasi Akun MySAPK bagi para Pegawai Negeri Sipil.pdf
4. ND Edaran Aktivasi Akun MySAPK bagi PNS.pdf
5. SIBANGALAN.pdf
6. SIGAPP.jpg
7. SIKD.jpg
8. SE 7 TAHUN 2021 PERUBAHAN SE 8 TAHUN 2021 PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PENUGASAN PEGAWAI.pdf
9. Absensi di Dashboard.jpg

**ABSENSI ONLINE WORK FROM HOME/OFFICE**

Profil Pegawai

[Cetak Riwayat Hidup](#)

Data Utama

NIP	197612062006041003
Nama	Gunawan
TMT Awal	04-01-2006
Kedudukan Hukum	Aktif
Pangkat/Golongan	Penata Tingkat I / III/d
Jabatan	Kepala Subbagian Protokol
Jenis Jabatan	Jabatan Administrasi (JA)
Unit Kerja	Subbagian Protokol
No. Kartu Pegawai	N.005003
No. KTP	0953090612760012
Jenis Kelamin	Pria
Agama	Islam
Status Kawin	Kawin
Celengen Dereb	A



Home



FITRI YULIANA

198207182009122003

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI



Profile Saya



Dokumen Saya



Kompetensi



Performa

Yang terbaru dari MySAPK

Pemutakhiran Data Mandiri

Perubahan riwayat data pribadi dapat dilakukan dengan mudah



[Lihat data riwayat](#)

[Lihat history pengajuan](#)

Layanan MySAPK

Fitur dan layanan penunjang data PNS



My KPE



Otentikasi

Stakeholder

Data penunjang dan kelengkapan pegawai



Home



Update Data



Notifikasi



Akun





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1296/KP.09/06/2021
Lampiran : satu berkas
Hal : **Aktivasi Akun MySAPK Aparatur Sipil Negara**

21 Juni 2021

Kepada Yth.

Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

di

Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Pasal 1 ayat (1): "Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk", serta Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara secara Elektronik Tahun 2021 Lampiran I nomor (2): "Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN dilakukan oleh *user* admin instansi SIASN paling lambat pada akhir minggu terakhir bulan Juni 2021".

Terkait dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemutakhiran data mandiri maka diharapkan kepada para pegawai ASN untuk dapat melakukan aktivasi MySAPK selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2021 dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengakses MySAPK menggunakan *handphone* masing-masing melalui <https://pdm-asn.bkn.go.id>. Untuk pengguna *android* mengklik tombol "Download MySAPK", sedangkan pengguna *iOS* mengklik tombol "MySAPK web";
2. Klik tombol "lupa *password*";
3. Isikan NIP dan *email* yang terdaftar di LHKPN. Sistem akan mengirimkan kode *token* ke *email*;
4. Buat *password* baru dan masukkan ke kolom *password*, kemudian masukkan kode *token*;
5. Jika isian benar, maka *user* dapat *login* di MySAPK dengan *password* baru.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1303491814210616025717

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

NOMOR 522/2200/KP.09/06/2021

Yth : Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Hal : Penyampaian Edaran Aktivasi Akun MySAPK bagi para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tanggal : 17 Juni 2021

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara secara Elektronik Tahun 2021, dan dalam rangka menindaklanjuti hasil Sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Instansi Pusat melalui Sistem Informasi ASN (SIASN) dan MySAPK yang telah diselenggarakan pada Kamis, 27 Mei 2021 di Hotel Fairmont; bahwa para pegawai ASN wajib melakukan aktivasi MySAPK melalui laman <https://pdm-asn.bkn.go.id> sampai dengan akhir minggu terakhir bulan Juni 2021.

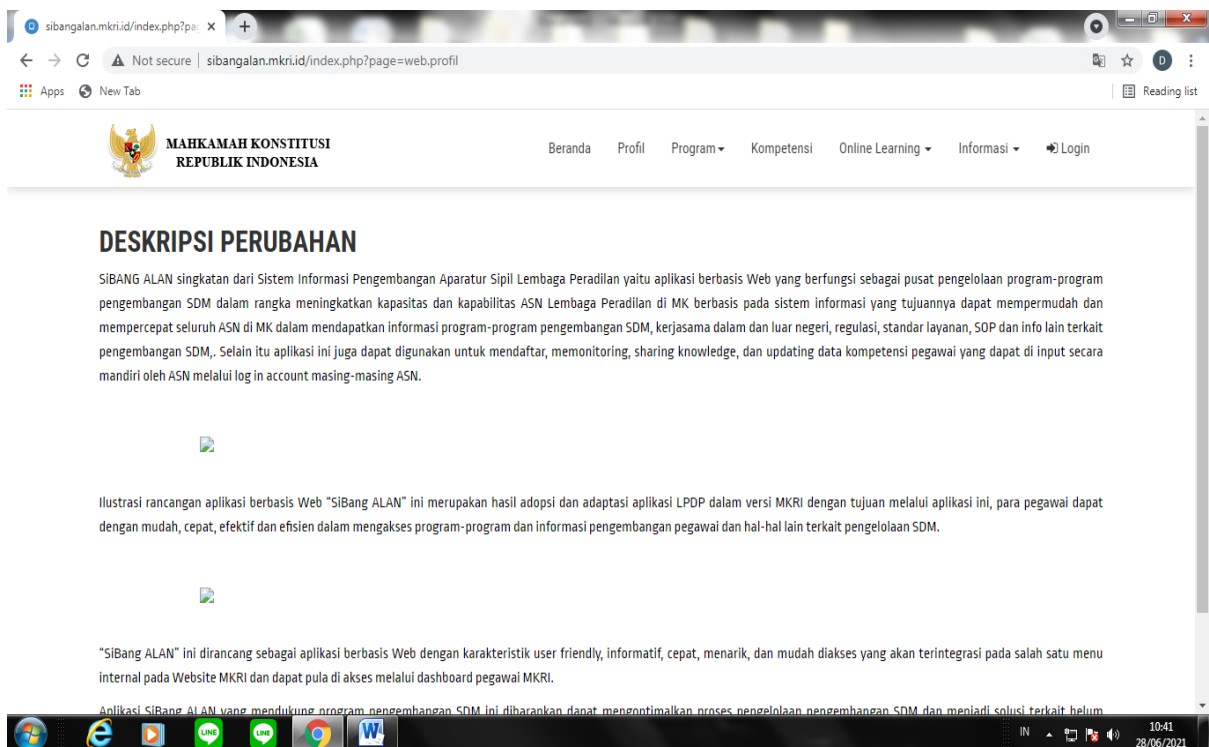
Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh instansi diwajibkan untuk turut serta dalam Program Satu Data Indonesia dengan melakukan pemutakhiran data mandiri para ASN melalui aplikasi MySAPK tahap pertama, yaitu aktivasi MySAPK pada *handphone* masing-masing pegawai sampai dengan akhir bulan Juni 2021. Dikarenakan di Mahkamah Konstitusi tidak terdapat pegawai PPPK dan PPT Non ASN, maka yang berpartisipasi hanya pegawai PNS. Selanjutnya bersama ini kami sampaikan konsep surat edaran aktivasi MySAPK bagi para PNS di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Biro Sumber Daya Manusia
dan Organisasi,
Teguh Wahyudi**



Digital Signature
mk1303491814210616025611





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIGAPP

Sistem Informasi Gaji Pegawai & Pejabat



Beranda

Referensi

Laporan

Log Off



GAJI INDUK



TUNKIN



HDPP



LEMBUR



MAKAN



PENDAPATAN LAIN

::15-June-2021::Diberitahukan bahwa Aplikasi SIGAPP sudah dapat diakses oleh Pegawai

NIP : 198207182009122003
 NAMA : FITRI YULIANA, S.SOS
 JABATAN : Analis Publikasi
 NPWP : 694292525411000

NIP : 198207182009122003
 NAMA : FITRI YULIANA, S.SOS
 JABATAN : Analis Publikasi
 NPWP : 694292525411000

INFORMASI GAJI TAHUN 2021

JENIS GAJI	TOTAL	RATA - RATA
GAJI POKOK	Rp. 26.798.100	Rp. 3.828.300
TUNKIN	Rp. 23.495.700	Rp. 3.915.950
HDPP	Rp. 98.651.974	Rp. 16.441.996
UANG MAKAN	Rp. 1.054.500	Rp. 527.250
UANG LEMBUR	Rp. 0	Rp. 0
PENDAPATAN LAIN	Rp. 285.000	Rp. 285.000
TAKE HOME PAY	Rp. 150.285.274	Rp. 24.998.496

INFORMASI GAJI BULAN JUNI 2021

JENIS GAJI	TOTAL
GAJI POKOK	Rp. 3.828.300
TUNKIN	Rp. 3.915.950
HDPP	Rp. 3.046.559
UANG MAKAN	Rp. 0
UANG LEMBUR	Rp. 0
PENDAPATAN LAIN	Rp. 0
TAKE HOME PAY	Rp. 10.790.809

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

PENCARIAN

Selamat Datang **Muhammad Halim** Anda Login Sebagai **Sekretaris** | Ubah Kata Sandi

- Beranda
- Draf Surat
- Registrasi Naskah
- Naskah Masuk
- Log Registrasi
- Berkas
- Laporan
- Keluar

Halaman Utama

Selamat Datang **Muhammad Halim**
 Penata Usaha Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
[Ubah Kata Sandi](#)

- 16 Surat Baru Milik Pimpinan !
- 5 Permohonan TTD
- 1 Tembusan
- 1 Disposisi
- 14 Nota Dinas

Surat Dinas

- Peraturan MK
- Peraturan Ketua MK

Riwayat Surat Dibaca Selama 7 Hari

Tampilkan data Pencarian :

No.	Tgl.Dibaca	Pengirim	Perihal	Jenis Surat	Kecepatan Respon
1	2021-06-15 20:25:31	Bagian Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri	Penunjukkan Driver Ops untuk Peninjauan Lokasi (18-21 Juni)	Nota Dinas	0 Hari 7 Jam 59 Menit
2	2021-06-15 20:17:04	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dalam Negeri	Permintaan Pembuatan dan Penyerahan Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan I tahun 2021	Teruskan	0 Hari 2 Jam 4 Menit
3	2021-06-15 20:15:39	Pranata Komputer Muda (Sri Haryanti)	Rapat HPS dan Lelang Smart Board	Nota Dinas	0 Hari 6 Jam 35 Menit
4	2021-06-15	Bagian Bagian Sekretariat Tetap	Nodin Permintaan Personal	Nota Dinas	0 Hari 4 Jam 51 Menit



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Kepada YM/Yth.:

1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi;
2. Ketua dan Anggota Dewan Etik;
3. Pejabat Struktural dan Fungsional;
4. Seluruh PNS, Tenaga Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN, dan Pegawai Kontrak di lingkungan Mahkamah Konstitusi

SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PENUGASAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Umum

Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam surat tugas pegawai, perlu mengatur kembali penetapan pejabat penandatanganan surat tugas pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan pejabat penandatanganan surat tugas pegawai dengan tujuan untuk :

1. Memberikan pemahaman yang jelas tentang pejabat penandatanganan surat tugas pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
2. Menghindari penyalahgunaan wewenang pejabat penandatanganan surat tugas pegawai dan meningkatkan akuntabilitas lembaga;
3. Meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengarsipan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

C. Ruang Lingkup

Dalam Surat Edaran ini hanya mengatur pelaksanaan penetapan pejabat penandatanganan surat tugas pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);



2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

E. Isi Edaran

1. Dalam rangka tertib administrasi dan tata kelola arsip yang baik, perlu mengatur kewenangan pejabat penandatanganan surat tugas pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
2. Surat tugas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal dibuat pejabat/staf terkait secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan ditandatangani secara digital oleh pejabat yang berwenang;
3. Pejabat yang berwenang menandatangani surat tugas pegawai adalah pejabat setingkat eselon I dan eselon II;
4. Surat tugas pegawai yang melibatkan eselon I/setara eselon I dan/atau eselon II/setara eselon II dan/atau eselon III/setara eselon III dan/atau eselon IV/setara eselon IV, surat tugas ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Surat tugas pegawai pejabat fungsional tertentu/khusus/umum yang melibatkan lebih dari 1 (satu) unit kerja, surat tugas ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada butir (4) dan (5) tidak dapat dipisah dan menjadi satu kesatuan dalam Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
7. Surat tugas pegawai pejabat fungsional tertentu/khusus/umum pada unit kerja tertentu ditandatangani secara digital oleh pejabat eselon II pada unit kerja yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan/disposisi dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
8. Penomoran surat tugas pegawai diberi nomor sesuai dengan klasifikasi tata naskah dinas yang telah diatur di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 2021
Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah



- Absensi Online
- Menu
- Absen
- Peta Sebaran
- Panduan Absensi
- Lokasi Saya
- Jadwal Saya
- Info Perangkat
- Log Absensi
- Error Logs

Absensi Online | 16 Juni 2021

WFH/WFO

NIP : 198207182009122003

NAMA : Fitri Yuliana

Hari ini

WFO

Mulai/Masuk: 07:22 WIB

Selesai/Pulang: ---

Presensi Gugus Tugas

Check-in: 07:22 WIB

Check-out: ---

Absen Pulang

Aktivitas WFH/WFO/Tugas Dinas

Bulan Juni